



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RENCANA KERJA TAHUN 2025



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 / 84 / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 diperlukan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 2025;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
 - b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal,

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050/ 84 /TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Kabupaten Pemalang	Wakil Ketua	
3.	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	
10.	Bendahara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Reni Sri Diartini
11.	Pengelola Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Rusmiyati
12.	Pengelola Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Agus Susilo
13.	Pengadministrasi Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Hindero Budijono
14.	Pranata Komputer Mahir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Ani Andriyani

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
15.	Pengelola Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Bambang Sukriman
16.	Pengelola Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	Anggota	Suwinarni

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Pemalang, 1 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	8
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	23
2.3 Inovasi dan Hasil evaluasi SAKIP	27
2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	28
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III.....	52
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	52
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57
BAB IV	59
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
4.1 Program dan Kegiatan	59
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76

J. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan dokumen tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pemalang secara substansial menjabarkan visi dan misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun ke Empat periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang diselaraskan dengan perencanaan dan sasaran pembangunan Nasional.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan melakukan Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi dengan Bappeda dan Pemangku kepentingan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

- 15) Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2030
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
- 22) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun

2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 – 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 nomor 6);
- 29) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2015);
- 30) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 41 Tahun 2023);
- 31) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 27);
- 32) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 38);
- 33) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini adalah untuk menyusun arah dan kebijakan SKPD pada Tahun Anggaran 2025 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Dimana arah dan kebijakan SKPD harus dapat dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 yang disusun melalui prioritas program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diampunya. Prioritas program kegiatan dan sub kegiatan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2025 guna dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dibidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dapat tercapai.
- c. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu pada Tahun 2025.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025 guna menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2025 bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025 guna mencapai tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.3 Inovasi dan Hasil Evaluasi SAKIP, RB
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- 2.5 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dalam Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke-delapan berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi APBD penetapan sebesar Rp.5.985.866.000, dan Anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp.333.900.000, sehingga total anggaran sebesar Rp.6.319.766.000. Sedangkan pada perubahan anggaran mendapatkan tambahan sebesar Rp. 12.888.000., sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 6.319.766.000, dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja Operasi	Rp. 5.948.285.000
- APBD	Rp. 5.614.385.000
- Dak Non Fisik	Rp. 333.900.000
• Belanja Modal	Rp. 371.481.000 +
Total	Rp. 6.319.766.000

Anggaran yang diterima tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu guna memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana yang disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/ 6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/ 4*100%)
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
	Bidang Penanaman Modal									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	4	2	2	100	2	8	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=$ $(10/4*100\%)$
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
	Dokumen Perubahan DPASKPD									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	2	1	1	100	1	4	80
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	4	2	2	100	2	8	80
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	126	52	26	26	100	26	104	82,5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Laporan	5	2	1	1	100	1	4	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	4	2	2	100	2	8	80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	24	12	12	100	12	48	80
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	60	24	12	12	100	12	48	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=$ $(10/4*100\%)$
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	60	24	12	12	100	12	48	80
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	24	12	12	100	12	48	80
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1.071	306	255	255	100	255	816	76,1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	980	350	210	90	42,8	210	650	66,3
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%	100	40	20	20	100	20	80	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=$ $(10/4*100\%)$
	Daerah									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	109	37	24	40	166,6	24	101	92,6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	12	12	100	12	48	80
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24	12	12	100	12	48	80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	24	12	12	100	12	48	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	84	42	21	26	123,8	21	89	105,9
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	30	15	67	446,6	15	112	186,6
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	2	1	0	0	1	3	75
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	132	66	33	0	0	33	99	75
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Persentase Peningkatan	%	18,45	5,95	3,05	5,41	177,2	3.10	14,46	78,3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
	jumlah investor									
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	8	4	2	1	50	2	7	87,5
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	0	1	100	0	2	200

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
Program Promosi penanaman Modal	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai investasi	Rupiah	892.996 .004.082	339.677 .810.803	176.666 .093.083	197.152 213.713	111,5	183.732 .736.806	720.562 .761.322	80,6
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80
Program pelayanan Penanaman Modal	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	%	479	190	96	99,89	104	96	385,89	80,5
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu	Persentase perijinan yang	%	100	40	20	20	100	20	80	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	disetujui									
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	27.500	10.250	5.500	15.692	285,3	5.750	31.692	115,2
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	1.200	480	240	100	34,5	41,6	621,6	51,8

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	$8=(7/6*100\%)$	9	$10=(5+7+9)$	$11=$ $(10/4*100\%)$
penyediaan Pelayanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	120	8	4	6	150	4	18	90
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	%	220	82	44	100	227,2	46	228	103,6
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100	40	20	20	100	20	80	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	96	44	22	22	100	22	88	91,6
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	45	18	9	9	100	9	36	80
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	66	26	13	13	100	13	52	78,7
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase realisasi perijinan	%	100	40	20	20	100	20	80	80
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Persentase tersusunnya Data/	%	100	40	20	20	100	20	80	80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
2	3		4	5	6	7	8=(7/6*100%)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4*100%)
Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Pelayanan Perizinan									
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80

Dari tabel kinerja tahun 2023 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat di kategorikan Baik. Dapat dilihat dari 6 program yang ada, sebanyak 3 program mencapai kinerja 100%, dan ada 3 program yang capaiannya melebihi 100%. Capaian Kinerja yang sangat baik bisa dilihat di Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mencapai 227,2%. Hal ini dikarenakan Para pelaku usaha sudah cukup tertib dan tepat waktu dalam melaporkan kegiatan usaha mereka.

Untuk capaian kinerja dibawah 85% ada di sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Adapun Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2023 secara ringkas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan (PBG) sebesar Rp.4.409.127.110,- (125%)
- b. Realisasi Belanja Operasi dan Modal Rp.6.168.722.471,- (97,60%)

Dari data capaian retribusi ijin Persetujuan Bangunan Gedung diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan capaian, tahun 2022 realisasi sebesar 101,%. Sedangkan untuk capaian tahun 2023 sangat baik, dapat dilihat dari capaian kinerja mencapai 125%.

Adapun rincian Realisasi Pendapatan adalah sebagaimana Tabel II.2 dibawah ini :

Table : II.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Realisasi Pendapatan
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Jenis	Retribusi Tahun 2022		Retribusi Tahun 2023		Ket
	Perijinan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	IMB/PBG	1.200.000.000	1.212.174.142	3.525.000.000	4.409.127.110	
2	Retribusi Izin Gangguan/ HO	-	-	-	-	
Jumlah		1.200.000.000	1.212.174.142	3.525.000.000	4.409.127.110	125%

Sebagai informasi bahwa semenjak tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tidak lagi mengampu retribusi PBG, karena sudah dialihkan ke DPUPR.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas Pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pemalang menangani perijinan non berusaha sebanyak 21 jenis ijin. Sedangkan untuk perijinan berusaha menggunakan system OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Adapun jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dalam 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2022 dan Tahun 2023 Sebagaimana tabel II.3

Tabel II.3
Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Ijin	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
1	Izin teraftar Pengobat Tradisional (STPT)	4	5	0	6	4	0
2	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	2	2	0	13	9	0
3	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	5	5	0	2	2	0
4	Izin Reklame						
	a. Izin Penyelenggaraan Reklame	326	326	0	471	471	0
	b. Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	10	9	0	14	11	0
5	Izin operasional Lembaga kesejahteraan social (LKS)/ Panti	3	2	0	10	4	0
6	Izin Pemakaman	20	20	0	25	24	0
7	Izin Pengabuan Mayat	18	18	0	20	19	0
8	Izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan	30	29	0	4	4	0
9	Izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal	5	1	0	1	0	0
10	Izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini (PAUD)	3	3	0	6	4	0
11	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0	0	0	0
12	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
13	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
14	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan						
	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	114	112	0	166	165	0
	-Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)	18	20	0	7	7	0
	-Surat Ijin Prakter Dokter (SIP)	304	238	0	295	264	0
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	619	591	0	461	453	0
	-Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)	96	86	0	97	101	0
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	101	91	0	51	52	0
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	12	12	0	6	4	0
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	9	7	0	10	10	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	35	37	0	8	8	0
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	7	7	0	3	3	0
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	18	18	0	4	4	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	29	29	0	6	6	0
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	1061	991	0	194	200	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	33	31	0	26	27	0
	-Surat Izin Kerja Perekam Medis	30	28	0	27	27	0
	-Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	4	4	0	2	2	0
	-Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	1	1	0	1	1	0
	-Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIPTW) /SIKTW	2	2	0	1	1	0
	-Surat izin praktik psikolog Klinis (SIPPK)	1	1	0	0	0	0
15	-Surat Izin Tukang Gigi	1	1	0	0	0	0
16	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	79	80	0	51	51	0
17	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0	0	0
18	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan local	0	0	0	0	0	0
19	Izin Insidentil	0	0	0	0	0	0
20	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	11296	11297	0	13365	13365	0
21	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0
22	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	127	117	0	147	149	0
23	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	8	5	0	15	9	0

No	Jenis Ijin	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
24	Izin Operasional Klinik	25	25	0	4	0	0
25	Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)	-	-	-	2	2	0
26	Izin operasional Laboratorium Klink pratama	-	-	-	1	1	0
	JUMLAH	14.456	14.251	0	15.522	15.464	0

Capaian realisasi perijinan Non OSS pada Tahun 2023 cukup baik dengan realisasi sebanyak 15.464 izin terbit. Izin paling banyak terbit terdapat pada izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro yang mencapai 13.365 Izin terbit.

Selain capaian kinerja pelaksanaan kegiatan maupun keuangan sebagaimana tersebut diatas juga adanya capaian terhadap kinerja SKPD yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang. Salah satu indikator kinerjanya adalah terkait peningkatan investasi di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2023 target investasi sebesar Rp.185.056.692.369 dengan realisasi investasi sebesar Rp.197.152.213.713 atau capaiannya sebesar 109%. Sedangkan untuk realisasi nilai SKM sangat baik karna dapat memperoleh nilai 88,93 dari target 84.

Berikut adalah realisasi atau capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan target RPJMD, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM* nasio nal	IKU	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN)		Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN	3%	4%	5%	6%	9,73	-	5%	6%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	84,0	84,2	84,4	84,6	88,93	-	84,4	84,6	
3	Persentase peningkatan jumlah investor			3,05	3,10	3,15	3,20	5,41	-	3,15	3,20	
4	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal			100	100	100	100	100	-	100	100	
5	Persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non peijinan penanaman modal			96	96	97	97	99,89	-	97	97	
6	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan tepat waktu			44	46	48	50	100	-	48	50	
7	Persentase realisasi perizinan			100	100	100	100	156,92	-	100	100	
8	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			37	38	39	40	39	-	39	40	
9	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			176.666 .093.08 3	183.732 .736.80 6	192.919 ,373,64 6	204.494 .536.06 4	197.152 .213.71 3	-	192,919 ,373,64 6	204.494.5 36.064	

2.3 Inovasi dan Hasil evaluasi SAKIP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang telah memiliki beberapa inovasi guna meningkatkan kemudahan terhadap pelayanan perizinan berusaha dan Non Berusaha. Dengan adanya inovasi ini yang sebelumnya pemohon harus datang langsung ke kantor untuk mengetahui syarat – syarat pengajuan ijin, sekarang bisa melalui online sehingga masyarakat dapat menghemat banyak waktu. Ada 3 Inovasi yang dimiliki yaitu :

1. Aplikasi SIMDU (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu), yaitu aplikasi perizinan Non berusaha secara Online. Dapat di akses pada laman “izinonline.pemalangkab.go.id”.
2. Gerai Ivestasi (investasi.pemalangkab.go.id), Adalah sebuah web site yang berisi Sektor sektor potensi investasi beserta komoditas unggulan Kabupaten Pemalang.
3. Aplikasi Aduan Berbasis Elektronik “SAMBATSUNG”, merupakan aplikasi pengaduan pelayanan perizinan berbasis website.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan Evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Renja tahun 2023 dan tahun 2024, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023, serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai skor 63,84 dengan kategori B (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Nilai B merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.5
Hasil Evaluasi SAKIP

Komponen SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Kabupaten Pemalang	
	No: 700/024/EVS/VI/2023 Tgl: 16 Juni 2023	No: 700/183/EVS/V/2024 Tgl: 27 Mei 2024
	2023	2024
Perencanaan Kinerja	21	21,07
Pengukuran Kinerja	18,9	19
Pelaporan Kinerja	9,75	9,87
Evaluasi Internal	13,75	13,90
Capaian Kinerja	Tidak termasuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021	Tidak termasuk komponen SAKIP pada Tahun 2022, sesuai permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021
Nilai SAKIP	63,40	63,84

2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

2.4.1 Permasalahan dan hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai satu urusan yaitu Penanaman Modal. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dihadapi adalah :

1. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat (MPP belum mengakomodir seluruh instansi yang ada).
2. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
3. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam peralihan sistem dari OSS v.1.1. menjadi OSS-RBA.

5. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi.
6. Belum disesuaikan kebijakan rencana pengembangan penanaman modal daerah dengan regulasi yang baru.
7. Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri.
8. Adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mempengaruhi proses investasi yang akan masuk di Kab. Pemalang.
9. Terhambatnya proses perijinan melalui OSS RBA karena sampai saat ini belum tersusunnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) akibat adanya kebijakan LSD.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul maka perlu dirumuskan kebijakan masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan Visi dan Misi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang periode Tahun 2021 – 2026.

Salah satu isu nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka peluang investor untuk masuk ke Kabupaten Pemalang semakin terbuka lebar. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan kinerja dari segi peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana dalam memberikan pelayanan terhadap Investor.

Penanaman Modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Tujuan Penanaman Modal adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Dasar Penanaman Modal

1. Pengembangan iklim Penanaman Modal
2. Promosi Penanaman Modal
3. Pelayanan Penanaman Modal
4. Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal
5. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal, dan
6. Pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka sangat berdampak positif untuk ikut meningkatkan kemakmuran /kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pemalang terkait investasi yaitu harus siap untuk menghadapi persaingan global dalam usaha menarik investor untuk berinvestasi. Isu strategis pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu perlu untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan investasi maka perlu adanya langkah-langkah yang kongkrit/nyata.

Adapun langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor :

Didukung 2 program

- a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

- b) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

2. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya :

Didukung 1 Program

- a) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

3. Belum disesuaikan kebijakan rencana pengembangan penanaman modal daerah dengan regulasi yang baru:

Didukung 1 program

- a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

4. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat

Didukung 2 program

- a) Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal

- b) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

2.4.2 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membuat dan mengatur proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat maka di harapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Kabupaten Pematang.

Isu lainnya yang perlu menjadikan perhatian juga adalah dengan adanya Amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengharuskan setiap Kabupaten/Kota mempunyai Mal Pelayanan Publik Digital. MPP Digital menjadi bagian dari Portal Nasional Pelayanan Publik yang terdiri atas : Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat yang terdiri atas pelayanan publik semua kementerian dan Lembaga, dan Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi tersebut.

Pernyataan penerapan Mal Pelayanan Publik Digital sudah dibuat dan telah dikirim ke Menpan-RB sebagai bentuk kesanggupan untuk menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik Digital. Direncanakan pada bulan juli 2024 akan segera di launching Mal Pelayanan Publik Digital.

Tabel. II.7
Analisis SWOT

ISU STRATEGIS	KEKUATAN (STRENGTH) - Potensi peluang investasi di berbagai sektor dan daya dukung investasi di Kabupaten Pemalang - Ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri melalui Perda Kabupaten Pemalang No 1 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038 - Tersedianya sarana dan prasarana Sistem Informasi Investasi (Gerai Investasi)	KELEMAHAN (WEAKNESS) - Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal - Upaya meningkatkan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya - Belum optimalnya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik
PELUANG (OPPORTUNITY) - Dukungan Pemerintah melalui terbitnya UU Cipta Kerja - Pengembangan Mall Pelayanan Publik - Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat sebagai media promosi Penanaman Modal	STRATEGI SO - Peningkatan Promosi Penanaman Modal - Peningkatan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	STRATEGI WO - Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi - Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
TANTANGAN (THREAT) - Masih adanya konflik kepentingan baik social ekonomi maupun lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal - Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya - Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri	STRATEGI ST Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	STRATEGI WT

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati terpilih yaitu :

Visi : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI”

Misi ada 6 yaitu :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih.
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong.
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan Berkesinambungan.

Sejalan visi dan misi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati ke 2 yaitu “ **MAKMUR** “ dan Misi ke 5 yaitu “**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Lokal**“

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing. (Program Unggulan : DEWI = Desa Wisata , KOIN= Kota Industri).

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2025 keterkaitan Isu Strategis , prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 diarahkan pada “Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”, meliputi :

1. Peningkatan implementasi Smart City;
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi pembangunan daerah yang inovatif;
3. Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Tehnologi;

4. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa;
5. Perlindungan, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah;
6. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur secara berkelanjutan;
7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar;
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Teknologi melalui Peningkatan layanan kemudahan investasi (regulasi insentif pelaku usaha, peta potensi investasi, Mal Pelayanan Publik Digital, Rencana Umum Penanaman Modal.

Adapun guna untuk merealisasikan prioritas tersebut perlu disusun program dan kegiatan untuk mendukungnya, dimana berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun program, Kegiatan dan sub kegiatan masih mengacu pada program dan kegiatan tahun 2024.

Tabel II.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 4.830.272.400

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	4.609.272.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	4.609.272.400	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan,Penganggara n,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	108.242.510	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan,Pengangg garan,laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	108.242.510	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.627.060	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.627.060	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	5.451.260	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	5.451.260	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	6.309.120	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	6.309.120	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	3.341.260	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan	1 Dokumen	3.341.260	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD			SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	5.616.620	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	5.616.620	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.962.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.962.760	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	78.934.430	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	78.934.430	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	100%	3.204.383.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan	100%	3.204.383.200	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	3.195.842.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	3.195.842.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.040.040	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.040.040	
	Penyusunan Pelaporan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	2 Dokumen	4.501.160	Penyusunan Pelaporan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	2 Dokumen	4.501.160	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Realisasi Anggaran			dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Prognosis Realisasi Anggaran			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	281.628.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	281.628.350	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.010.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.010.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	108.041.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	108.041.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	15.607.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	15.607.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	149.169.950	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	149.169.950	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang	100%	100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintah Daerah		Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	659.100.500	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	659.100.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	146.592.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	146.592.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	510.508.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	510.508.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	100%	355.917.740	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	100%	355.917.740	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	72.247.740	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	29 Unit	72.247.740	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	58.670.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	58.670.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	225.000.000	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	225.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3,15%	53.940.300	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL enetapan Pemberian	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3,15%	53.940.300	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	4.188.300	Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	4.188.300	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	4.188.300	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	4.188.300	
	Pembuatan Peta		Persentase tersusunnya	100%	49.752.000	Pembuatan Peta		Persentase	100%	49.752.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Potensi Investasi Kabupaten/Kota		dokumen Peta Potensi Investasi			Potensi Investasi Kabupaten/Kota		tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi			
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.752.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.752.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	54.629.700	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	54.629.700	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	192.919,373.646	54.629.700	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	192.919,373.646	54.629.700	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.629.700	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.629.700	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	97%	75.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	97%	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	75.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	75.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	130 Keg Usaha	15.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari	130 Keg Usaha	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Pelaku Usaha			
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	48%	12.430.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	48%	12.430.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	12.430.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	12.430.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi	13 Kegiatan Usaha	5.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan	13 Kegiatan Usaha	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	25.000.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH TOTAL					4.830.272.400					4.830.272.400	

2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dengan fungsi Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berasal dari 2 item, yang pertama dari tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan yang kedua dari hasil pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut ini usulan dari masyarakat melalui mekanisme Survei Kepuasan Masyarakat dan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 :

- a. Survei Kepuasan Masyarakat :
 1. Tidak adanya kotak saran
 2. Tempat parkir kurang luas
 3. Tempat duduk pemohon kurang
 4. Untuk lebih meningkatkan lagi kecepatan waktu pelayanan
 5. Jam pelayanan hanya setengah hari
- b. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 :
 1. Perlu segera dilakukan implementasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital
 2. Perlu segera dilakukan pengembangan Mal Pelayanan Publik Tahap 2 sehingga bisa menambah jumlah instansi yang bergabung dalam MPP
 3. Menyusun buku maupun video profil peluang investasi di Kabupaten Pemalang
 4. Perlunya penyusunan regulasi (Peraturan Bupati) terkait pemberian insentif.

Dari hasil usulan masyarakat diatas maka tidak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan malakukan peningkatan kualitas pelayanan yang akan di akomodir pada Sub Kegiatan penyediaan pelayanan terpadu

perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Tujuh agenda pembangunan nasional yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, memperhatikan Nawa Cita Kedua tersebut yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya untuk tahun 2024 yaitu **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”**.

2. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Investasi/ BKPM

Visi yang dirumuskan adalah :

“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8

(delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

Misi (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;

Misi (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sementara itu BKPM juga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs),
- b) Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

- c) Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal
- d) Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal,
- e) Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal,
- f) Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
- g) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
- b) Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal
- c) Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi,
- d) Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar
- e) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor,
- f) Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
- g) Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri

3. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah (DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah)

Sedangkan telaahan terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023 yang menjadi arah Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Strategi :

- Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;

- Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP, perkuatan SPIP, serta zona integritas;
 - Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
 - Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan : Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualitas

Strategi : Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui:

- Pemberian kemudahan perizinan investasi
- Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
- Mengembangkan digital investment promotion;
- Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
- Mendorong perwujudan investasi hijau.

Dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi jika menilik dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah sejalan.

4. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 diarahkan pada “Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”, meliputi :

1. Peningkatan implementasi Smart City;
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi pembangunan daerah yang inovatif;
3. Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Tehnologi;
4. Penguatan fasilitasi, koordinasi dan pengembangan pembangunan desa;

5. Perlindungan, pengembangan dan reaktualisasi nilai budaya daerah;
6. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur secara berkelanjutan;
7. Penanganan kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar;
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Teknologi melalui Peningkatan layanan kemudahan investasi (regulasi insentif pelaku usaha, peta potensi investasi, Mal Pelayanan Publik Digital, Rencana Umum Penanaman Modal.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 mengacu pada tahun keempat penjabaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang diarahkan pada ***“Percepatan pembangunan melalui penguatan kualitas SDM, infrastruktur, inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah”***.

Apabila mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025, maka Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.
2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian hukum dan transparansi proses perizinan serta Implementasi pemberian insentif penanaman modal untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pemalang.
3. Pemutakhiran data dan informasi terkait profil potensi, peluang dan daya dukung investasi serta informasi terkait dengan perijinan dan non perijinan.
4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi luar daerah.
5. Meningkatkan promosi potensi unggulan di Kabupaten Pemalang dan produk – produk UMKM dengan melakukan pameran, promosi melalui website gerai investasi dan media sosial lainnya.
6. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang pengisian dan penyampaian LKPM.
7. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan dan Sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pelaksanaan penjabaran visi dan misi Bupati Pematang Jaya. Perwujudan Pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung misi ke 5 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal“ Dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebutkan salah satu prioritas pembangunan Tahun 2025 adalah Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pematang Jaya tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, seperti diuraikan pada Tabel III.1 dibawah ini :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Realisasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Investasi (PMA dan PMDN)	%	5
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,4

Adapun langkah- langkah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya dalam mengatasi Permasalahan dan isu Strategis Pada tahun 2025 sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor :

Didukung 2 program

- a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

- b) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

2. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya :

Didukung 1 Program

- a) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

3. Belum disesuaikan kebijakan rencana pengembangan penanaman modal daerah dengan regulasi yang baru:

Didukung 1 program

- a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

4. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat

Didukung 2 program

- a) Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal

- b) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045

RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2045;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD.

visi jangka panjang Kabupaten Pemalang tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan yaitu “PEMALANG MULYA (MAJU, UNGGUL, LESTARI DAN BERBUDAYA)” dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Maju

Kemajuan suatu daerah atau masyarakat diartikan mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Kabupaten yang maju diartikan sebagai daerah yang berhasil mencapai tujuan pembangunan dilihat dari tingkat ekonomi, kemajuan teknologi, keamanan dan menjadi tempat yang ideal bagi masyarakatnya untuk hidup serta pelayanan fasilitas publik yang baik, pelayanan pendidikan serta fasilitas kesehatan yang sudah sangat memadai. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang maju dimana hal ini akan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan inovasi.

B. Unggul

Masyarakat Kabupaten Pemalang yang memiliki kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi, visioner serta memiliki pemikiran maju, optimistis, didukung semangat belajar dan berprestasi yang tinggi. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang unggul dimana hal ini akan fokus pada

pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.

C. Lestari

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun daerah Jawa Tengah dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Kabupaten yang lestari merupakan komitmen untuk mendorong implementasi pembangunan berkelanjutan dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan keunggulan dari sisi komoditas pertanian dan perkebunan, potensi pariwisata, produk UMKM hingga inovasi. Prinsip yang ada berupa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dalam perwujudan pokok visi ini, Kabupaten Pemalang berkontribusi nyata pada target nasional untuk menarik investasi berkualitas ramah lingkungan, ramah sosial untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru, serta mencegah resiko kebencanaan dan krisis iklim. Selain itu, beberapa upaya lain untuk mewujudkan Pemalang yang lestari adalah dengan bergotong royong dengan para pihak lintas sektor dan lintas latar belakang untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab ekosistem penting yang ada di Kabupaten Pemalang. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi wilayah yang lestari dimana hal ini akan fokus pada pembangunan berwawasan lingkungan.

D. Berbudaya

Masyarakat Kabupaten Pemalang di tahun 2045 diharapkan merupakan Masyarakat yang berbudaya. Makna dari Masyarakat berbudaya antara lain, Masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, tata kelola pemerintahan yang baik, bertindak terpuji, tidak melakukan kerusakan serta memegang teguh nilai-nilai agama, tradisi, kearifan dan budaya lokal. Diharapkan pada tahun 2045, Kabupaten Pemalang akan menjadi Kabupaten yang berbudaya dimana hal ini akan fokus pada pengembangan budaya, agama dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045 yang sesuai dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, antara lain :

Tabel III.2 Tabel Realisasi dan Target Indikator Utama Pembangunan (IUP)
RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2045

No	Indikator Sasaran Pokok / Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Realisasi				Target Kabupaten			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Baseline 2025 Kab	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	14,27	13,39	13,17	12,15	12,38	12,63	12,76	12,91

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah yang menjadi bidang tugasnya.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta mempunyai tolok ukur guna pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang juga mendukung program unggulan bupati yaitu Kota Industri (KOIN). Melalui program pengembangan iklim penanaman modal dan program promosi penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan informasi tentang peta potensi penanaman modal di kabupaten pemalang.

Sedangkan kedudukan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus selaras dengan sasaran dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Dimana rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam RKPD Tahun 2025 yaitu mengampu **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal :**

Permasalahan di bidang penanaman modal yang menjadi prioritas pembangunan daerah :

1. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor :

Didukung 2 program

- a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

b) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

2. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya :

Didukung 1 Program

a) Program Promosi Penanaman Modal

Indikatornya : Persentase terlaksananya promosi penanaman modal

3. Belum disesuaikan kebijakan rencana pengembangan penanaman modal daerah dengan regulasi yang baru:

Didukung 1 program

a) Program Pengembangan iklim Penanaman Modal.

Indikatornya : Persentase peningkatan jumlah investor.

4. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat

Didukung 2 program

a) Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal

b) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikatornya : Presentase realisasi perijinan

Dari empat permasalahan diatas, maka rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya adalah :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - 2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya
- 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- 3) Pengawasan Penanaman Modal

f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 4.1
Matrik Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang
Tahun 2025

No	Rencana Tahun 2025					Perkiraan Maju Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	4.609.272.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas PMPTSP	Persentase terwujudnya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	4.609.272.400	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	108.242.510	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	108.242.510	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.627.060	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.627.060	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	5.451.260	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	5.451.260	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2025

			Penyusunan Dokumen RKASKPD					Penyusunan Dokumen RKASKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	6.309.120	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	6.309.120	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	3.341.260	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	3.341.260	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	5.616.620	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	5.616.620	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.962.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.962.760	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	78.934.430	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	78.934.430	
	Administrasi	Dinas	Persentase	100%	3.204.383.20	Administrasi Keuangan	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya	100%		

RENJA DPMPTSP TAHUN 2025

	Kuangan Perangkat Daerah	PMPTSP	terlaksananya aktifitas Administrasi Keuangan		0	Perangkat Daerah		aktifitas Administrasi Keuangan		3.204.383.200	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	3.195.842.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	3.195.842.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.040.040	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.040.040	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.501.160	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.501.160	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	281.628.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	281.628.350	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.010.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.010.000	
	Penyediaan	Dinas	Jumlah Paket Bahan	12 Paket	108.041.400	Penyediaan Bahan	Dinas	Jumlah Paket Bahan	12 Paket	108.041.400	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2025

	Bahan Logistik Kantor	PMPTSP	Logistik Kantor yang Disediakan			Logistik Kantor	PMPTSP	Logistik Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	15.607.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	15.607.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	149.169.950	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	149.169.950	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	659.100.500	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah	100%	659.100.500	

	Pemerintahan Daerah							daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	146.592.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	146.592.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	510.508.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	510.508.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	100%	355.917.740	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pemeliharaan Barang milik daerah	100%	355.917.740	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	72.247.740	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	72.247.740	

	Lapangan										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	58.670.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	58.670.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	225.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	225.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3,15%	53.940.300	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL enetapan Pemberian	Dinas PMPTSP	Persentase peningkatan jumlah investor	3,15%	53.940.300	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	4.188.300	Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	100%	4.188.300	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	4.188.300	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	4.188.300	

	Penanaman Modal										
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi	100%	49.752.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase tersusunnya dokumen Peta Potensi Investasi	100%	49.752.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.752.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.752.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	54.629.700	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%	54.629.700	
	Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	192.919,373.646	54.629.700	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah nilai investasi	192.919,373.646	54.629.700	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.629.700	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.629.700	

	ta										
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	97%	75.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	97%	75.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	75.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase perijinan yang disetujui	100%	75.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	

	Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		secara Elektronik			Terintegrasi secara Elektronik		Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Plaku usaha	5.000.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	130 Keg Usaha	15.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	130 Keg Usaha	15.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	48%	12.430.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	48%	12.430.000	

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	12.430.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	12.430.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	2.430.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9 Pelaku Usaha	5.000.000	

	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	5.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	13 Kegiatan Usaha	5.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas PMPTSP	Persentase realisasi perijinan	100%	25.000.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	
JUMLAH TOTAL					4.830.272.400						

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya dalam menunjang Tugas dan Fungsinya serta mendukung Program Unggulan Bupati Kota Industri (KOIN) terdiri dari 6 Program 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

Pemalang, 1 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, S.H, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680323 199003 1 012